Available online at website :

<http://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/index/index>

Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning

|  |
| --- |
| **Implementasi Program Bantuan Stimulan (BSPS) Perumahan Swadaya Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019**  **Tarma Sartima1 & Rahmad Rosadi2**  1,2 Dosen Fakultas Ilmu Politik, Universitas Ekasakti  E-mail: [tarmasartima@ymail.com1](mailto:jufrizalkurniawan@gmail.com1),  [rahmadrosadi2@gmail.com2](mailto:yasmeardi17@yahoo.com2) |
| Submit: 19 September 2020, Revisi: 22 September 2020, Approve: 29 September 2020 |
|  |

**Abstrak**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program BSPS ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang lebih layak huni bagi masyarakat. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis ataupun lisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilihat dari beberapa variable yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan di Kecamatan Padang Laweh masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni, kendala yang ditemui dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang informasi kaitannya program BSPS, upaya kedepannya pemerintah khususnya kecamatan padang laweh lebih optimal lagi dalam menyampaikan informasi program BSPS kemasyarakat dengan cara mensosialisasikan program BSPS tersebut dengan berkoordinasi kepada setiap nagari yang ada dibawah pemerintahan Kecamatan Padang Laweh

**Keywords:** implementasi, program bantuan stimulant, perumahan swadaya

**PENDAHULUAN**

Perumahan dan permukiman merupakan urusan bersama yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perumahan dan Permukiman menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Untuk menjawab pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak, Pemerintah Sumatera Barat menjalankan Program Bedah Rumah dari Kementerian PUPR tahun 2019 ini, tidak terlepas juga pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang juga diberi amanah untuk merealisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di tahun 2019 ini.

Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2019 kabupaten Dharmasraya memperoleh bantuan rehabilitasi untuk rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan sebanyak 1.005 rumah. Pemerintah kabupaten Dharmasraya memiliki strategi sendiri untuk menjalankan program tersebut agar program dapat cepat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran, dengan menyerahkan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini kepada anak pemerintahannya yang di tingkat kecamatan, untuk mengimplementasikan program tersebut kepada nagari- nagari yang ada di dalam ruang lingkup kecamatannya masing- masing.

Salah satu kecamatan yang diberi amanah dari pemerintah kabupaten Dharmasraya untuk mengimplementasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2019 ini yaitu Kecamatan Padang Laweh. Kecamatan Padang Laweh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Kecamatan Padang Laweh terdiri dari kenagarian: Padang Laweh, Batu Rijal, Sopan Jaya, dan Muaro Sopan.

Untuk melancarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kecamatan Padang

Laweh bekerja sama dengan pemerintah bawahannya di tingkat Nagari, yang mana tiap- tiap Nagari di Kecamatan Padang Laweh di pimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari diberikan tugas pokok di dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mana tugas pokoknya menyeleksi warganya yang memang berhak mendapatkan bantuan pembedahan rumah, agar pembedahan rumah tepat sasaran.

Pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edward III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pernyataan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edward III ada empaat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

**METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatifdeskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata- kata, gambar bukan angka- angka. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif deskritif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan peraktek yang berlaku, serta mengumpulkan data dan menuang data dari lapangan melalui oservasi, angket dan wawancara dan kemudian dianalisa. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Menurut Sugyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan teknik purposive sampling, penulis menetapkan sampel dalam penelitian yaitu 8 orang yang dianggap mewakili jumlah populasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).**

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya tahun 2019, Camat dan Wali Nagari memliki beberapa kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Camat
2. **Memantau progres, percepatan dan kelancaran implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).**

Camat turut serta memantau progres, percepatan dan kelancaran implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), agar program dapat terlaksana dengan baik, serta Camat juga bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang bisa ditemui dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya tahun 2019.

1. **Ikut mengawasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).**

Seorang Camat memiliki peran penting dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga sangat perlu Camat untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut, agar implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya mampu terlaksana sesuai dengan yang di harapkan.

1. **Memberi motivasi kepada masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).**

Camat harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, agar masyarakat mau berpartisipasi dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Camat juga harus mampu memberikan motivasi kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ketika program menemui kendala. Agar implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat terlaksana dengan baik.

1. Wali Nagari
2. Mengusulkan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Wali Nagari sangat berperan penting dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), karena Wali Nagari memiliki hak untuk menyeleksi dan mengusulkan masyarakat yang berhak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

1. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Wali Nagari turut serta terjun kelapangan untuk memantau dan mengawasi implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar program terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan.

Ada empat variabel menurut Edward III , yang digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan. Sudah sejauh mana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kecamatan Padang Laweh kabupaten Dharmasraya dapat di tinjau dari variabel-variabel tersebut yang akan di deskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. Adapun variabel implementasi kebijakan, yaitu : *communication* ( komunikasi)*, resources (sumber daya), dispotitions (disposisi) and bureaucratic structure (struktur birokrasi)*.

1. Pertama komunikasi, komunikasi merupakan faktor awal yang sangat penting dalam sebuah implmentasi, komunikasi berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam. Mengenai hal itu Camat dan Wali Nagari telah menyampaikan informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh tahun 2019 kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Laweh. Namun berhasil atau tidaknya penyampaian informasi kepada masyarakat tergantung bagaimana masyarakat mengerti maksud, tujuan , sasaran dan subtansi dari program BSPS tersebut.
2. Kedua Sumber Daya, Keberhasilan proses implementasi kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para aktor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan.Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial.
3. Ketiga Disposisi Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam program BSPS dijalankan baik oleh para implementor sehingga mendapat anggapan baik dari masyarakat selama menjalankan program BSPS.
4. Keempat Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedur atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standart Operating Procedur (SOP) memang sangat memiliki pengaruh dalam kelancaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya tahun 2019. Namun hal itu tidak bisa juga kita lepaskan bagaimana pengaruh hubungan antar birokrasi dalam program BSPS ini, karena hubungan birokrasi yang baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang baik pula antar birokrasinya, dan sebaliknya hubungan birokrasi yang tidak baik akan menciptakan sebuah koordinasi yang tidak baik pula antar birokrasinya.

**Kendala-Kendala yang di temui dalam Implementasi Program Bantuan** **Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Masih banyak masyarakat yang tidak fokus dalam mendengarkan informasi BSPS itu sendiri sehingga masyarakat sering menanyakan hal yang sama, masyarakat yang dituju sering tidak ada di rumah karena mereka pada siang hari pergi bekerja keladang, yang mana hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses pendataan, masyarakat yang terkadang tidak mau bekerja sama karena banyak dari masyarakat penerima BSPS yang bekerja setiap siang harinya, dalam menentukan kemauan, keinginan, dan kecenderungan adalah masyarakat bingung mencari dana tambahan dalam program ini, karena masyarakat tau uang tujuh belas juta limaratus ribu tidak akan cukup membangun rumah mereka, banyak masyarakat yang kebingungan untuk membedah keseluruhan rumahnya atau Cuma membedah sedikit sajab dan dalam pelaksanaan Standard Operating Procedur (SOP) masih kurangnya pehaman mengenai SOP implementasi program Bantuan Stimulaan Perumahan Swadaya oleh para jorong di Nagari.

**Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Implementasi** **Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS)**

Menginformasikan kembali kepada masyarakat mengenai program BSPS tersebut agar masyarakat lebih paham lagi, mengingatkan kembali masyarakat yang lupa atau tidak mengetahui informasi BSPS terebut, dengan cara mensosialisasikan kembali kerumah-rumah masyarakat yang mendaftar BSPS mengenai program tersebut, menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai maksud,tujuan,sasaran serta subtansi program bantuan stimulant perumahan swadaya kepada masyarakat.

Membuat jadwal pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak ada kendala lagi dalam melaksanakan program BSPS ini karena masyarakat yang bekerja, dan saya juga membentuk 2 kelompok dalam program, menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa program ini juga membutuhkan anggaran swadaya dari sipenerima BSPS agar masyrakat bisa mempersiapkan diri mereka dalam melaksanakan program tersebut, mendengarkan dan memahami keinginan dari masyarakat serta tidak lupa pula kita arahkan masyarakat tersebut dalam pengambilan keputusan, mengarahkan masyarakat dalam keinginan yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan msayarakat, dan kepada kepala jorong yang belum paham mengenai SOP dalam pelaksanaan implementasi program BSPS akan di memberikan pemahaman kembali kepada mereka agar pelaksanan program dapat berjalan dengan baik.

**PENUTUP**

Implementasi Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, dilakukan dengan memberikan bantuan anggaran pembedahan senilai Rp 17,5 juta untuk masing- masing penerima bantuan. Untuk melancarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kecamatan Padang Laweh bekerja sama dengan pemerintah bawahannya di tingkat Nagari, yang mana tiap- tiap Nagari di Kecamatan Padang Laweh di pimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari diberikan tugas pokok di dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mana tugas pokoknya menyeleksi warganya yang memang berhak mendapatkan bantuan pembedahan rumah, agar pembedahan rumah tepat sasaran. Menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi,sumberdaya,disposisi, dan struktur birokrasi, keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memilikihubungan erat yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, keempat variabel tersebut sudah terealisasi dengan baik. Meskipun di lapangan masih ditemui kendala namun masih dapat diatasi dengan baik dan sesuai dengan target yang di rencanakan.

**REFERENSI**

Abdul Majid, 2014. implementasi kurikulum 2013 kajian teoritis dan praktis, Bandung: Interes Media.

Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo.

Budi Winarno,2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses(Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Dwiyanto Indiahono, 2009. KebijakanPublikBerbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta : Gava Media.

Guntur Setiawan,2004.Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.

Hasil Pengolahan data oleh Fasilitator BSPS 2019 Kecamatan Padang Laweh. Hasil Pengolahan data olehTim Pendataan Kecamatan Padang Laweh Tahun

2018.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi

Pikiran George Edwards, Yogyakarta : Lukman Offset.

Irawan, 2004. Penelitian Kualitatif, Jakarta : STIA- LAN Press.

Lexy J. Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Rosda Karya.

M.Irfan Islamy, 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Miftah Thoha, 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, dkk., 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nurdin Usman,2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo.

Purwanto, 2014. Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soeprihanto, John. (2001). Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan,

Edisi Pertama, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Soetomo, 2012. Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono, 2014. Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan kombinasi (mixed method), Bandung : Alfabeta.